

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018 SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
Untuk Priode Yang Berakhir 31 Desember 2022



2022

Laporan Tahunan

Jalan Raya Pembangunan Gunungsindur - Bogor

KATA PENGANTAR

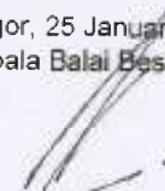
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BBPM SOH adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BBPM SOH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BBPM SOH. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 25 Januari 2023
Kepala Balai Besar,


Dr. drh. Kresno Suharto, M.P
NIP. 196308071991031002

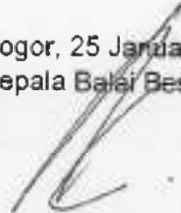
20

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BBPMSOH yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 25 Januari 2023
Kepala Balai Besar,



Dr. drh. Kresno Suharto, M.P.
NIP. 196308071991031002

ef

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 06
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN 411962

Waktu Olap: 2023-02-09 01:30:09.0 JB@684403
Konek Lap : LRA.F.S
Tanggal : 09/02/23 7:28 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_sakter_komparatif-SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3,200,000,000	3,505,435,357	305,435,357	110	2,500,000,000	3,225,356,891	(725,356,891)	129
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	3,200,000,000	3,505,435,357	305,435,357	110	2,500,000,000	3,225,356,891	(725,356,891)	129
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	6,183,115,000	5,866,272,868	316,842,132	95	6,255,178,000	6,231,859,855	23,318,145	100
	BELANJA BARANG	25,785,866,000	25,578,965,331	206,900,669	99	27,628,992,000	21,935,994,709	5,692,997,291	79
	BELANJA MODAL	647,738,000	642,558,499	5,179,501	99	4,235,050,000	4,231,988,800	3,061,200	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 06
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN 411962



Waktu Cetak : 2023-02-08 01:13:08 0 B@2840171
Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 09/02/23 17:28 AM
Halaman : 2
Prj ID : lap_lra_face_salker_komparatif -SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	32,616,719,000	32,087,796,698	528,922,302	98	38,119,220,000	32,389,843,364	5,719,376,636	88
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018

KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : 06

DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KDUAPPAW : 018060200KD

BA(018) ES1(06) JAWA BARAT

KODE SATKER : 411962

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

Tgl Data 09/02/23 1:15 AM

Tgl. Cetak 09/02/2023 7:20 AM

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	626,185,500	726,185,500	(100,000,000)	(13.77)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(626,185,500)	(3,630,925)	(622,554,575)	17,145.89
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	722,554,575	(722,554,575)	(100.00)
Persediaan	379,005,581	374,716,475	4,289,106	1.14
JUMLAH ASET LANCAR	379,005,581	1,097,271,050	(718,265,469)	(65.46)
ASET TETAP				
Tanah	15,765,000,000	15,765,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	76,825,775,105	76,249,598,974	576,176,131	0.76
Gedung dan Bangunan	27,140,047,000	27,140,047,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,559,332,650	1,559,332,650	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(65,760,713,884)	(58,774,648,905)	(6,986,064,979)	11.89
JUMLAH ASET TETAP	55,529,440,871	61,939,329,719	(6,409,888,843)	(10.35)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	59,278,368	0	59,278,368	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(59,278,368)	0	(59,278,368)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	55,908,446,452	63,036,600,769	(7,128,154,317)	(11.31)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	55,908,446,452	63,036,600,769	(7,128,154,317)	(11.31)
JUMLAH EKUITAS	55,908,446,452	63,036,600,769	(7,128,154,317)	(11.31)
JUMLAH EKUITAS	55,908,446,452	63,036,600,769	(7,128,154,317)	(11.31)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	55,908,446,452	63,036,600,769	(7,128,154,317)	(11.31)

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
UNIT ORGANISASI : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 411962

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JAWA BARAT
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

Tgl Data 09/02/23 1:06 AM
Tgl. Cetak 09/02/2023 7:28 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	626,185,500	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	626,185,500
0.0	117111	Barang Konsumsi	316,217,686	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,826,645	0
0.0	117131	Bahan Baku	35,153,250	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	24,808,000	0
0.0	131111	Tanah	15,765,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	76,825,775,105	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	27,140,047,000	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	823,137,400	0
0.0	134112	Irigasi	481,183,000	0
0.0	134113	Jaringan	255,012,250	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	57,354,931,430
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,352,153,648
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	817,684,170
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	80,964,104
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	154,780,532
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	59,278,368	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	59,278,368
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	32,087,796,698
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,505,435,357	0
0.0	391111	Ekuitas	0	63,036,600,769
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	41,766,750	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	722,554,575	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,894,857
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,806,182,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	10,988,500
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,150,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	569,920,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,761,396,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	57,427	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	282,823,700	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	72,132,078	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	42,070,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	650,950,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	27,731,963	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	203,862,300	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
 UNIT ORGANISASI : 06
 WILAYAH/PROVINSI : 0200
 SATUAN KERJA : 411962

KEMENTERIAN PERTANIAN
 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 JAWA BARAT
 BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

Tgl. Data 09/02/23 1:06 AM

Tgl. Cetak 09/02/2023 7:28 AM

lap_neraca_percobaan_aktual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	565,395,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	47,075,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	212,779,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,513,776,830	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	85,077,600	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,543,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	173,280,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	182,757,500	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	34,560,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,735,387,023	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,919,837,048	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,989,279	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	220,352,332	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	178,755,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	130,043,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	697,810,930	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	627,630,753	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,509,404,718	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	163,111,200	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	2,188,244,538	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	48,656,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	375,000,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	363,119,308	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,507,323,402	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,470,430,734	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3,502,154	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	16,192,821	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	6,127,486	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,730,907,261	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	55,042,685	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	1,129,273,670	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	6,505,116,450	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBK	0	100,000,000
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	7,104,000	0
JUMLAH			165,076,010,576	165,076,010,576

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
UNIT ORGANISASI : 08
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 411962

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JAWA BARAT
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

Tgl Data 09/02/23 1:14 AM

Tgl. Cetak 09/02/2023 7:28 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	32,087,796,698
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,505,435,357	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,894,857
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,806,182,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	300,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	10,988,500
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,150,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	100,000,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	569,920,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,761,396,400	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	57,777	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	350
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	282,823,700	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	72,132,078	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	42,070,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	651,680,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	730,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	27,731,963	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	203,862,300	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	565,395,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	47,255,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	180,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	212,779,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,513,776,830	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	85,077,600	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,543,100	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	173,260,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	182,757,500	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	34,560,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,736,227,023	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	840,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,127,436,230	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	2,303,312,942	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,919,837,048	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,989,279	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	220,352,332	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	176,755,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	130,043,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
UNIT ORGANISASI : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 411962

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JAWA BARAT
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

Tgl Data 09/02/23 1:14 AM

Tgl. Cetak 09/02/2023 7:28 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	697,810,930	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	627,630,753	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,509,404,718	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	163,111,200	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,189,003,295	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	758,757
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48,656,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	375,000,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	363,152,808	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	33,500
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	5,993,880,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	642,558,499	0
JUMLAH			35,595,774,662	35,595,774,662

LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESK/LON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 411962
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JAWA BARAT
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI
OBAT HEWAN

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 09/02/23 7:28 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker -SAKTI
Tgl Data : 09/02/23 1:16 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,403,285,357	3,238,741,392	164,543,965	5.08
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,403,285,357	3,238,741,392	164,543,965	5.08
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,403,285,357	3,238,741,392	164,543,965	5.08
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,866,272,868	6,231,859,855	(365,586,987)	(5.866)
Beban Persediaan	13,365,297,381	3,684,083,439	9,681,213,942	262.785
Beban Barang dan Jasa	6,188,462,712	5,442,498,990	745,963,722	13.706
Beban Pemeliharaan	3,053,000,286	1,678,605,446	1,374,394,840	81.877
Beban Perjalanan Dinas	2,975,019,846	1,871,132,094	1,103,887,752	58.996
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	9,004,100,000	(9,004,100,000)	(100)
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 411962
JENIS SATUAN KERJA : KD

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JAWA BARAT
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI
OBAT HEWAN**

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 09/02/23 7:28 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker -SAKTI
Tgl Data : 09/02/23 1:16 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7,003,576,597	7,081,114,761	(77,538,164)	(1.095)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(100,000,000)	3,630,925	(103,630,925)	(2,854.19)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	38,351,629,690	34,997,025,510	3,354,604,180	9.585
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(34,948,344,333)	(31,758,284,118)	(3,190,060,215)	10.045
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	119,870,999	(119,870,999)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	119,870,999	(119,870,999)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,150,000	15,777,020,000	(15,774,870,000)	(99.986)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,150,000	15,777,020,000	(15,774,870,000)	(99.986)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,150,000	15,896,890,999	(15,894,740,999)	(99.986)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(34,946,194,333)	(15,861,393,119)	(19,084,801,214)	120.322
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(34,946,194,333)	(15,861,393,119)	(19,084,801,214)	120.322

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 **KEMENTERIAN PERTANIAN**
ESELON I : 06 **DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 411962 **BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

Tgl Data : 09/02/23 1:17 AM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 09/02/23 7:28 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker -SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	63,036,600,769	50,394,435,796	12,642,164,973	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(34,946,194,333)	(15,861,393,119)	(19,084,801,214)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(764,321,325)	(697,867,684)	(66,453,641)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(41,766,750)	(697,867,684)	656,100,934	-
LAIN-LAIN	(722,554,575)	0	(722,554,575)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	28,582,361,341	29,201,425,776	(619,064,435)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(7,128,154,317)	12,642,164,973	(19,770,319,290)	-
EKUITAS AKHIR	55,908,446,452	63,036,600,769	(7,128,154,317)	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022**

BBPMSOH
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Jl. Raya Pembangunan Gunung Sindur

KATA PENGANTAR

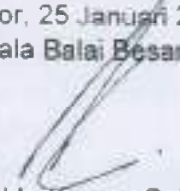
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BBPMSOH adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BBPMSOH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BBPMSOH. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 25 Januari 2023
Kepala Balai Besar,


Dr. drh. Kresno Suharto, M.P
NIP. 196308071991031002

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	19
B.2. Belanja	21
B.3. Belanja Pegawai	22
B.4. Belanja Barang	23
B.5. Belanja Modal	24
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	26
C.1.1. Piutang Bukan Pajak	26
C.1.2. Persediaan	26
C.2. Aset Tetap	27
C.2.1. Tanah	27
C.2.2. Peralatan dan Mesin	27
C.2.3. Gedung dan Bangunan	28
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	28
C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28
C.3. Ekuitas	
C.3.1. Ekuitas	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	30
D.2. Beban Pegawai	31
D.3. Beban Persediaan	31
D.4. Beban Barang dan Jasa	32
D.5. Beban Pemeliharaan	33
D.6. Beban Perjalanan Dinas	34
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	34
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	37
E.2. Surplus/Defisit-LO	37
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	37
E.4. Transaksi Antar Entitas	37
E.5. Kenaikan/Penurunan Entitas	37

E.6. Ekuitas Akhir	37
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	
F.1. Transaksi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	38
F.2. Pengungkapan Lain-lain	39
F.2.1 Penggunaan Dana Pen	39
F.2.2. Piutang PT. Ziya Sunanda	40

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BBPMSOH Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.505.435.357,00 atau mencapai 110% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.200.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp32.087.796.698,00 atau mencapai 98% dari alokasi anggaran sebesar Rp32.616.719.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp55.908.446.452,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp379.005.581,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp55.529.440.871,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Utang kepada Pihak Ketiga I sebesar Rp0,00; Utang Yang Belum Ditagihkan sebesar Rp0,00; Utang Muka dari KPPN sebesar Rp0,00

Nilai Ekuitas sebesar Rp55.908.446.452,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp55.908.446.452,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.403.285.357,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp38.351.629.690,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-34.948.344.333,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp2.150.000,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-34.946.194.333,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022

adalah sebesar Rp63.036.600,769,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-34.946.194.333,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-764.321.325,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp28.582.361.341,00 dan ditambah Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp-7.128.154.317,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp55.908.446.452,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BBPMSOH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2022			31 Desember 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	3.200.000.000,00	3.505.435.357,00	110	3.225.356.891,00
Jumlah Pendapatan		3.200.000.000,00	3.505.435.357,00	110	3.225.356.891,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	6.183.115.000,00	5.866.272.868,00	95	6.231.859.855,00
Belanja Barang	B.4.	25.785.866.000,00	25.578.965.331,00	99	21.935.994.709,00
Belanja Modal	B.5.	647.738.000,00	642.558.499,00	99	4.231.988.800,00
Jumlah Belanja		32.616.719.000,00	32.087.796.698,00	98	32.399.843.364,00

II. NERACA

BBPMSOH
NERACA
PER 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	626.185.500,00	726.185.500,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	626.185.500,00	-3.630.925,00
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	C.1.4.	0,00	722.554.575,00
Persediaan	C.1.5.	379.005.581,00	374.716.475,00
Jumlah Aset Lancar		379.005.581,00	1.097.271.056,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	15.765.000.000,00	15.765.000.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	76.825.775.105,00	76.249.598.974,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	27.140.047.000,00	27.140.047.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.559.332.650,00	1.559.332.650,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-65.760.713.884,00	-58.774.648.905,00
Jumlah Aset Tetap		55.529.440.871,00	61.939.329.719,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	59.278.368,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-59.278.368,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Aset		55.908.446.452,00	63.036.600.769,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	0,00	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2.	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.3.	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	55.908.446.452,00	63.036.600.769,00
Jumlah Ekuitas		55.908.446.452,00	63.036.600.769,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		55.908.446.452,00	63.036.600.769,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BBPMSOH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	3.403.285.357,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.403.285.357,00
BEBAN		
Beban Pegawai	D.2.	5.866.272.868,00
Beban Persediaan	D.3.	13.365.297.381,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	6.188.462.712,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	3.053.000.286,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.975.019.846,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	7.003.576.597,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	0,00
JUMLAH BEBAN		38.351.629.690,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-34.948.344.333,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	2.150.000,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.150.000,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-34.946.194.333,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BBPMSOH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	63.036.600,769,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-34.946.194.333,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-764.321.325,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	28.582.361.341,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-7.128.154.317,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	55.908.446.462,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BBPMSOH

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi "Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Guna mendukung upaya pemerintah tersebut Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diantaranya adalah melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan, pelaksanaan sertifikasi obat hewan, pelaksanaan pengkajian obat hewan, pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar, pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan, pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan, pengelolaan hewan percobaan, pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan, pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan, pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan, pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi, pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan, pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan, pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan, pengkajian batas maksimum residu obat hewan, pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan, pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan, pemberian pelayanan teknis pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan, pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan, pemberian pelaksanaan sertifikasi, pemantauan dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BBPMSOH. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang diinput melalui aplikasi SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BBPM SOH menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BBPM SOH dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BBPM SOH yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BBPM SOH adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BBPMSOH telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00
Jumlah Pendapatan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.263.196.000,00	5.963.115.000,00
Belanja Lembur	100.000.000,00	220.000.000,00
Belanja Barang Operasional	1.775.471.000,00	1.785.307.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.030.040.000,00	1.995.557.000,00
Belanja Barang Persediaan	4.534.000.000,00	7.525.533.000,00
Belanja Jasa	2.531.000.000,00	2.487.900.000,00
Belanja Pemeliharaan	3.101.240.000,00	3.007.104.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.696.500.000,00	2.990.585.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	4.900.000.000	5.993.880.000
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	647.738.000,00
Jumlah Belanja	28.031.447.000,00	32.616.719.000,00

Sampai dengan Semester II Anggaran Tahun 2022 di BBPMSOH telah mengalami revisi sebanyak 11 kali, dimana revisi terakhir pada tanggal 02 Desember 2022.

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.505.435.357,00 atau mencapai 109,54% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	,%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	3.200.000.000,00	2.806.182.000,00	87,69
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	15.894.857,00	100
Pendapatan Denda	0,00	10.988.500,00	100
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	300.000,00	100
Pendapatan Lain-Lain	0,00	672.070.000,00	100
Jumlah	3.200.000.000,00	3.505.435.357,00	109,54

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami Kenaikan sebesar 9,54% dibandingkan periode Desember TA 2021. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BBPMSOH adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	,%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2.806.182.000,00	3.060.966.000,00	-8,32
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	15.894.857,00	140.942.345,00	-88,72
Pendapatan Denda	10.988.500,00	8.368.546,00	31,30
Pendapatan Jasa Lainnya	300.000,00	3.060.000,00	-90,19
Pendapatan Lain-Lain	672.070.000,00	12.020.000,00	-5,491
Pendapatan lain-lain II	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.505.435.357,00	3.225.356.891,00	8,68

Pendapatan administrasi dan penegakan hukum sebesar Rp2.806.182.000,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari sertifikasi obat hewan. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha dan penerimaan klaim asuransi BMN sebesar Rp15.894.857,00 diperoleh dari akun sewa tanah gedung dan bangunan yang berasal dari sewa rumah dinas. Pendapatan denda sebesar Rp 10.988.500,00 diperoleh dari denda penyelesaian pekerjaan pemerintah yaitu denda keterlambatan pekerjaan pengadaan sapi potong lokal wilayah Provinsi Maluku Utara oleh CV. Misharalafasy sebesar Rp10.686.000,00 dan kekurangan

pengenaan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan sapi potong lokal wilayah Provinsi Jawa Timur oleh CV. Cipta Karya Pribadi sebesar Rp302.500,00. Denda lain-lain terdapat 3 yaitu Rp2.150.000,00 berasal dari pengembalian belanja barang perjalanan dinas atas nama Joen Firmanta P,dkk pada tanggal 1-3 Desember 2021, dimana perjalan dinas tersebut dibatalkan. Penerimaan lain-lain sebesar Rp569.920.000,00 berasal dari penyetoran klaim jaminan pelaksanaan atas wanprestasi CV.Cipta Karya Pribadi pada paket pekerjaan pengadaan sapi potong lokal untuk Provinsi Jawa Timur. Dan Penerimaan Kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar 100.000.00,00 berasal dari PT. Ziya Sunanda Indonesia tanggal bayar pada 21 November 2022.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp32.087.796.698,00 atau 98.39% dari anggaran belanja sebesar Rp32.616.719.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	6.183.115.000,00	5.866.272.868,00	94,89
Belanja Barang	25.785.866.000,00	25.578.965.331,00	99.2
Belanja Modal	647.738.000,00	642.558.499,00	99.2
Total Belanja	32.616.719.000,00	32.087.796.698,00	98.39

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja TA 2022 masih rendah dibandingkan realisasi belanja pada periode Desember Tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Penurunan Realisasi anggaran dimana anggaran Tahun 2022 sebesar 32.087.796.698,00 sedangkan anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp32.399.843.364,00.
2. Adanya Penurunan Belanja Pegawai di Tahun 2022 dimana belanja modal sebesar 5.866.272.868,00.
3. Adanya Kenaikan Belanja Barang di Tahun 2022 dimana belanja modal sebesar 25.578.965.331,00.
4. Adanya Penurunan Belanja Modal di Tahun 2022 dimana belanja modal sebesar 642.558.499,00.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	%
Belanja Pegawai	5.866.272.868,00	6.231.859.855,00	94,13
Belanja Barang	25.578.965.331,00	21.935.994.709,00	116,6
Belanja Modal	642.558.499,00	4.231.988.800,00	15,18
Total Belanja	32.087.796.698,00	32.399.843.364,00	99,03

Belanja pegawai sebesar Rp5.866.272.868,00 dilakukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta pembayaran uang lembur. Belanja barang sebesar 25.578.965.331,00 digunakan untuk beberapa akun. Belanja barang terdiri dari Belanja barang operasional sebesar Rp1.776.677.530,00; Belanja barang non operasional sebesar Rp1.952.704.523,00; Belanja barang persediaan sebesar Rp7.430.749.172,00; Belanja barang jasa sebesar Rp2.451.976.659,00; Belanja pemeliharaan sebesar Rp2.997.957.601,00; Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp2.975.019.846,00; dan Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp5.993.880.000,00.

Belanja modal sebesar Rp642.558.499,00 digunakan untuk pembelian Vacuum Freezer Dry Chamber sebanyak 2 buah sebesar Rp42.240.000,00, pembelian AC split sebanyak 2 buah senilai Rp19.869.000,00, pembelian tabung gas sebanyak 3 buah senilai Rp11.220.000,00, pembelian dispenser sebanyak 3 buah senilai Rp9.879.000,00, pembelian 1 buah Oxygen regulator senilai Rp2.750.000,00, dan pembelian alat penunjang laboratorium lainnya senilai Rp37.185.000,00.

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.866.272.868,00 dan Rp6.231.859.855,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 5,86% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.
2. Perbandingan periode yang tersaji adalah pada periode Desember 2022 dengan Desember 2021.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.654.404.218,00	6.153.929.046,00	-8,11
Belanja Lembur	212.779.000,00	79.921.000,00	166,23
Jumlah Belanja Kotor	5.867.183.218,00	6.233.850.046,00	-5,88
Pengembalian Belanja Pegawai	-910.350,00	-1.990.191,00	-54,25
Jumlah Belanja	5.866.272.868,00	6.231.859.855,00	-5,86

Adanya kenaikan lembur yang tinggi pada tahun 2022 dikarenakan adanya frekuensi pekerjaan yang meningkat dan penurunan jumlah SDM yang memasuki masa purna bakti. Masuknya penyakit hewan baru ke Indonesia seperti *Lumpy Skin Diseases* (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), BBPMSOH sebagai UPT pengujian vaksin satu-satunya di Indonesia harus segera melakukan pengujian vaksin hewan tersebut yang menuntut hasil uji secara cepat dalam rangka pengendalian penyakit hewan di Indonesia. Selain itu dengan frekuensi kegiatan pengujian yang meningkat sehingga pemeliharaan fasilitas pengujian juga meningkat. Penggunaan fasilitas lab biosafety level 3, adanya pekerjaan pengujian obat hewan pada hari libur nasional dan pekerjaan di akhir tahun yang mengharuskan pegawai untuk lembur agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

8 B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp25.578.965.331,00 dan Rp21.935.994.709,00. Realisasi belanja barang TA 2022 jika dibandingkan dengan periode Desember 2022 mengalami kenaikan penurunan sebesar 30,36%. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Lebih rendahnya anggaran belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, berupa bantuan sapi potong dari program Ruminansia Potong dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 hanya sebesar 5.993.880.000,00 sedangkan pada Desember tahun 2021 sebesar Rp 9.004.100.000,-.
2. Masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa belanja barang yang diantaranya barang operasional, dan belanja barang lainnya.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.776.677.530,00	2.285.353.515,00	-46,81
Belanja Barang Non Operasional	1.952.704.523,00	1.308.110.773,00	-79,25
Belanja Barang Persediaan	7.430.749.172,00	3.986.049.689,00	-16,10

Belanja Jasa	2.451.976.659,00	1.849.034.702,00	-31,46
Belanja Pemeliharaan	2.997.957.601,00	1.632.213.936,00	1,27
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.975.812.103,00	1.871.280.294,00	-18,24
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	5.993.880.000,00	9.004.100.000,00	-33,43
Jumlah Belanja Kotor	25.580.597.588,00	21.936.142.909,00	-30,36
Pengembalian Belanja Barang	1.632.257,00	-148.200,00	-100
Jumlah Belanja	25.578.965.331,00	21.935.994.709,00	-30,36

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp642.558.499,00 dan Rp4.231.988.800,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar -96,33% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan belanja modal dikarenakan adanya penurunanan anggaran belanja modal dimana anggaran belanja modal pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 340.000.000,00

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	642.558.499,00	4.231.988.800,00	-96,33
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	642.558.499,00	4.231.988.800,00	-96,33
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	642.558.499,00	4.231.988.800,00	-96,33

Belanja modal sebesar Rp642.558.499,00 digunakan untuk pembelian beberapa peralatan yang diantaranya adalah pembelian Vacuum Freezer Dry Chamber sebanyak 2 buah sebesar Rp42.240.000,00, pembelian AC split sebanyak 2 buah senilai Rp19.869.000,00, pembelian tabung gas sebanyak 3 buah senilai Rp11.220.000,00, pembelian dispenser sebanyak 3 buah senilai Rp9.879.000,00, pembelian 1 buah Oxygen regulator senilai Rp2.750.000,00, dan pembelian alat penunjang laboratorium lainnya senilai Rp37.185.000,00.

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp642.558.499,00 dan

Rp4.231.988.800,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -84,81% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan belanja modal dikarenakan adanya penurunan anggaran belanja modal dimana anggaran belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp4.231.988.800,00.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	642.558.499,00	4.231.988.800,00	-84,81
Jumlah Belanja Kotor	642.558.499,00	4.231.988.800,00	-84,81
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	642.558.499,00	4.231.988.800,00	-84,81

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp626.185.500,00 dan Rp726.185.500,00.

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Bukan Pajak	626.185.500,00	726.185.500,00
Jumlah	626.185.500,00	726.185.500,00

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp626.185.500,00 merupakan Uang Muka Belanja (prepayment) per 31 Desember sebesar Rp480.910.000,00 merupakan piutang pembayaran uang muka pembelian mesin Kejda Mrck Buchi sebanyak 20% dari total nilai kontrak kepada PT. Ziya Sunanda Indonesia, dimana kontraknya telah diputus berdasarkan surat Keputusan Kontrak Nomor: 14005/PL.030/F5.I/10/2021 pada tanggal 14 Oktober 2021. Besar kontrak tersebut Rp 2.904.550.000,00, sehingga besar pembayaran uang muka mesin tersebut adalah Rp 580.910.000,00. Tagihan piutang uang muka telah disampaikan kepada PT. Ziya Sunanda, namun sampai laporan ini dibuat belum terdapat penyelesaian pembayaran. Data tagihan tertuang dalam Kode Billing nomor: 820230126281501 tanggal 26 Januari 2023 dengan tanggal kadaluarsa 02 Februari 2023. Dan Penyetoran jaminan Pelaksanaan TA.2022 dari PT. Ziya Sunanda Indonesia sebesar Rp145.227.500,00 tertuang dalam Kode Billing nomor: 820230126281679. Dan uang yang sudah dibayarkan sebesar 100.000.000,00 dalam kode billing 820221121112678.

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp379.005.581,00 dan Rp374.716.475,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	316.217.686,00	132.870.525,00
Bahan untuk Pemeliharaan	2.826.645,00	3.731.200,00
Bahan Baku	35.153.250,00	219.688.750,00

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan Lainnya	24.808.000,00	18.426.000,00
Jumlah	379.005.581,00	374.716.475,00

Pembelian barang konsumsi sebesar Rp316.217.686,00 merupakan pembelian barang untuk kegiatan operasional kantor (Pembelian ATK, Bahan Cetak, Bahan Penunjang Lainnya, Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium, Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya, Bahan Bakar Minyak, Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya, dan Bahan Pakan)

Pembelian bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp. 2.826.645,00 merupakan pembelian untuk pemeliharaan kantor pembelian berupa barang untuk kebersihan untuk menunjang kegiatan operasional kantor

pembelian berupa bahan baku sebesar Rp. 35.153.250,00 merupakan pembelian bahan baku berupa Bahan kimia padat, Bahan Kimia Cair Bahan bakar Gas, Bahan Bakar dan Pelumas, Bahan Lainnya untuk pengujian bahan kimia, bahan penunjang lainnya

pembelian barang persediaan lainnya sebesar Rp.24.808.000,00 merupakan pembelian hewan uji telur SPF dan bahan penunjang lainnya

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tanah Peralatan dan Mesin yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.765.000.000,00 dan Rp15.765.000.000,00. Tanah di BBPMSOH saat ini masih dalam proses pengurusan sertifikat.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp76.825.775.105,00 dan Rp76.249.598.974,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	76.249.598.974,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	576.176.131,00
Transfer Masuk	0,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00
Penghapusan	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	76.825.775.105,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-57.354.931.430,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	19.470.843.675,00

Pembelian peralatan mesin sebesar Rp155.263.000,00 digunakan untuk pembelian Vacuum Freezer Dry Chamber sebanyak 2 buah sebesar Rp42.240.000,00, pembelian AC split sebanyak 2 buah senilai Rp19.869.000,00, pembelian tabung gas sebanyak 3 buah senilai Rp11.220.000,00, pembelian dispenser sebanyak 3 buah senilai Rp9.879.000,00, pembelian 1 buah Oxygen regulator senilai Rp2.750.000,00, dan pembelian alat penunjang laboratorium lainnya senilai Rp37.185.000,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp27.140.047.000,00 dan Rp27.140.047.000,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.559.332.650,00 dan Rp1.559.332.650,00.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-65.760.713.884,00 dan Rp-58.774.648.905,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	76.825.775.105,00	-57.354.931.430,00	19.470.843.675,00
2.	Gedung dan Bangunan	27.140.047.000,00	-7.352.153.648,00	19.787.893.352,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.559.332.650,00	-1.053.628.806,00	505.703.844,00
Akumulasi Penyusutan		105.525.154.755,00	-65.760.713.884,00	39.764.440.871,00

C.3. EKITAS

C.3.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp55,908,446,452 dan Rp63.036.600.769,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.403.285.357,00 dan Rp3.093.465.892,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	10.988.500,00	8.368.546,00	31,30
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	300.000,00	3.060.000,00	-90,19
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2.806.182.000,00	3.060.966.000,00	-8,32
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,00	5.320.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.894.857,00	15.751.346,00	0,91
Pendapatan Anggaran Lain-lain	569.920.000,00	0,00	100
Jumlah	3.403.285.357,00	3.093.465.892,00	10,01

Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional mengalami perbedaan karena adanya perbedaan dalam pembacaan sistem, dimana pendapatan berupa penerimaan kembali belanja barang dari tahun anggaran yang lalu tidak tercatat pada Laporan Operasional namun pada Laporan Realisasi Anggaran tercatat yaitu sebesar 2.150.000,00, serta adanya perbedaan dalam penerimaan kembali Modal tahun anggaran yang lalu tidak tercatat pada Laporan Operasional namun pada Laporan Realisasi Anggaran tercatat yaitu sebesar 100.000.000,00.

Pendapatan sebesar Rp2.806.182.000,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari sertifikasi obat hewan. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp 10.988.500,00 diperoleh dari denda penyelesaian pekerjaan pemerintah yaitu denda keterlambatan pekerjaan pengadaan sapi potong lokal wilayah Provinsi Maluku Utara oleh CV. Misharalafasy sebesar Rp10.686.000,00 dan kekurangan pengenaan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan sapi potong lokal wilayah Provinsi Jawa Timur oleh CV. Cipta Karya Pribadi sebesar Rp302.500,00.

Pendapatan dari anggaran lain sebesar Rp569.920.000,00 berasal dari penyetoran klaim jaminan pelaksanaan atas wanprestasi CV.Cipta Karya Pribadi pada paket pekerjaan pengadaan sapi potong lokal untuk Provinsi Jawa Timur.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.866.272.868,00 dan Rp6.231.859.855,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.761.396.400,00	4.080.561.400,00	-7,82
Beban Pembulatan Gaji PNS	57.427,00	62.380,00	-7,94
Beban Tunj. Anak PNS	72.132.078,00	78.743.510,00	-8,39
Beban Tunj. Beras PNS	203.862.300,00	221.967.300,00	-8,15
Beban Tunj. Fungsional PNS	650.950.000,00	683.020.000,00	-4,69
Beban Tunj. PPh PNS	27.731.963,00	29.725.395,00	-6,70
Beban Tunj. Struktural PNS	42.070.000,00	58.950.000,00	-28,63
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	282.823.700,00	313.249.870,00	-9,71
Beban Tunjangan Umum PNS	47.075.000,00	48.720.000,00	-3,37
Beban Uang Lembur	212.779.000,00	79.921.000,00	166,23
Beban Uang Makan PNS	565.395.000,00	636.939.000,00	-11,23
Jumlah	5.866.272.868,00	6.231.859.855,00	-5,86

Secara keseluruhan beban pegawai di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan jika dibandingkan dengan periode Desember 2021 mengalami penurunan sebesar -5,86%. Beban pegawai yang mengalami kenaikan cukup besar terdapat pada beban uang lembur yaitu sebesar 166,23%. Kenaikan beban uang lembur dikarenakan banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada jam kerja biasa sehingga harus diselesaikan diluar jam kerja.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp13.365.297.381,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	1.129.273.670,00	2.268.744.431,00	-50,22
Beban Persediaan konsumsi	5.730.907.261,00	903.322.858,00	534,42
Beban persediaan lainnya	6.505.116.450,00	512.016.150,00	1170
Jumlah	13.365.297.381,00	3.684.083.439,00	262,7

Persediaan bahan baku merupakan persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan pengujian berupa bahan kimia, baik bahan kimia cair, kimia padat, gas, dan kimia lainnya. Beban persediaan konsumsi mengalami kenaikan yang sangat tinggi dikarenakan peningkatan kegiatan pengujian. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan target uji sampel ditingkat balai. Beban persediaan konsumsi merupakan bahan untuk kegiatan operasional kantor, beban ini juga mengalami peningkatan sebesar 262,7 %.

Beban persediaan lainnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan beban persediaan lainnya yang berasal dari adanya kesalahan pembelian barang berupa Sapi Indukan/PO silangan yang diserahkan ke masyarakat dengan akun 526115 sebesar Rp. 5.993.880.000,- (Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dalam pencatatannya masuk ke kode barang 1010801001 yang merupakan kode barang hewan untuk penelitian yang tercatat di modul Komitmen sehingga barang itu di input pada transaksi masuk persediaan dengan kode barang tersebut dan langsung dikeluarkan dari modul persediaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Sapi ke Masyarakat.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp6,188,462,712,00,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 :

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	220.352.332,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.543.100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	173.280.000,00
Beban Jasa Profesi	178.755.000,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Jasa Lainnya	130.043.000,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.735.387.023,00
Beban Bahan	182.757.500,00
Beban Langganan Listrik	1.919.837.048,00
Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	85.077.600,00
Beban Honor Output Kegiatan	34.560.000,00
Beban Langganan Telepon	2.989.279,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	7.104.000,00
Beban Keperluan Perkantoran	1.513.776.830,00
Jumlah	6.188.462.712,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.053.000.286,00 dan Rp1.678.605.446,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	627.630.753,00	508.942.226,00	23,32
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.509.404.718,00	1.123.271.710,00	34,37
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	55.042.685,00	46.391.510,00	18,64
Beban Persediaan suku cadang	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	163.111.200,00	0,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	697.810.930,00	0,00	100,00
Jumlah	3.053.000.286,00	1.678.605.446,00	81,87

Beban pemeliharaan secara keseluruhan mengalami kenaikan 81,87%, kenaikan disebabkan adanya beban pemeliharaan gedung dan bangunan, serta adanya pemeliharaan jaringan dimana pada tahun sebelumnya beban tersebut tidak ada. Beban pemeliharaan jaringan berasal dari perbaikan jaringan internet kantor.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.975.019.846,00 dan Rp1.871.132.094,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.188.244.538,00	858.370.288,00	154,9
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	363.119.308,00	915.437.144,00	-60,33
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.656.000,00	20.289.000,00	139,8
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	375.000.000,00	77.035.662,00	386,78
Jumlah	2.975.019.846,00	1.871.132.094,00	58,99

Beban Perjalanan Dinas secara umum mengalami kenaikan sebanyak 58,99% dibandingkan dengan periode Desember 2021. Beban perjalanan dinas yang mengalami kenaikan signifikan mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu pada beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan pertemuan koordinasi maupun workshop di dalam kota yang berkaitan dengan kesuksesan program-program kerja yang ada.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp9.004.100.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	9.004.100.000,00	-100

	Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Jumlah		0,00	9.004.100.000,00	-100

Beban barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan sapi potong program Ruminansia Potong pada tahun 2022 tercatat 0. Hal tersebut dikarenakan terdapat kesalahan dalam pencatatan akun sehingga pembelian barang berupa Sapi Indukan/PO silangan yang diserahkan ke masyarakat dengan akun 526115 sebesar Rp. 5.993.880.000,- (Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dalam pencatatan nya masuk ke kode barang 1010801001 yang merupakan kode barang hewan untuk penelitian yang tercatat di modul Komitmen sehingga barang itu di input pada transaksi masuk persediaan dengan kode barang tersebut dan langsung dikeluarkan dari modul persediaan sesuai dengan Berita Acara Serah terima Sapi ke Masyarakat. Beban barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan sapi potong program Ruminansia Potong pada tahun 2022 berupa ternak sapi sebanyak 500 ekor pada 20 kelompok Tani Ternak di Provinsi Jawa Timur.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp7.003.576.597,00 dan Rp7.107.449.391,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.470.430.734,00	1.470.430.734,00	-0,00
Beban Penyusutan Irigasi	16.192.821,00	16.192.821,00	-0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.502.154,00	29.836.784,00	-88,26
Beban Penyusutan Jaringan	6.127.486,00	6.127.486,00	-0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.507.323.402,00	5.584.861.566,00	-1,38
Jumlah	7.003.576.597,00	7.107.449.391,00	-1,46

Adanya penurunan beban penyusutan dan amortisasi sebesar 1,46% disebabkan oleh :

1. Adanya perbaikan fasilitas baik gedung dan bangunan, irigasi, jalan dan jembatan, jaringan, serta peremajaan peralatan dan mesin.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	119.870.999,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	119.870.999,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.150.000,00	12.020.000,00	82,11
Jumlah	2.150.000,00	131.890.999,00	98,36

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp2.150.000,00 berasal dari pengembalian uang perjalanan dinas atas nama Joen Perangin Angin, dkk pada tanggal 1-3 Desember 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp63.036.600.769 dan Rp50.394.435.796,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp-34.946.194.333,00 dan Rp-15.861.393.119,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-764.321.325,00 dan Rp697.867.684,00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp28.582.361.341,00 dan Rp29.201.425.776,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.5. Kenaikan /Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan Ekuitas adalah nilai kenaikan atau penurunan dari suatu entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 saldo penurunan entitas adalah sebesar Rp-7.128.154.317,00.

E.6. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.908.446.452,00

F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**F.1. Transaksi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat**

Tidak terdapat Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat pada satuan kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi obat Hewan (018.06.0200.411962.000.KD) berupa Sapi Indukan/PO silangan yang diserahkan ke masyarakat dengan kun 526115 sebesar Rp. 5.993.880.000,- (Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang masuk pada kode barang Persediaan lainnya dengan kode barang 1010801001 periode pelaporan Triwulan III Tahun 2022.

Dengan ini menyatakan bersedia menghibahkan Barang Milik Negara yang berasal dari Akun 526115 TA. 2022 pada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dalam rangka Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa Sapi Indukan Lokal sebanyak 500 (*Limaratus*) ekor (terlampir) dengan total nilai perolehan sebesar Rp. 5.993.880.000,- (*Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu upiah*) kepada Kelompok Tani/Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana daftar nama penerima bantuan Hibah 526115 berupa Sapi Indukan Lokal.

No	Nama Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Kode Barang Persediaan	Nama Barang	Spesifikasi BMN (Merk/Type)	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Tahun Perolehan	Penerima Hibah (Kelompok/tani/ernak)	Kondisi
							Kuantitas	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jombang	Tembelang	Kedungotok		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	11,678,000	233,560,000	2022	Kedungotok	Baik
2	Jombang	Jogoroto	Sumber Muljo		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	11,678,000	233,560,000	2022	Sumber Sapon	Baik
3	Jombang	Wonosalam	Sambirejo		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	11,678,000	233,560,000	2022	Berkah Tamma	Baik
4	Jombang	Gudo	Menturus		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	11,678,000	233,560,000	2022	Jampirogo	Baik
5	Madiun	Balerejo	Warurejo		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	11,678,000	233,560,000	2022	Muljo Sejahtera	Baik
6	Madiun	Kebonsari	Mojorejo		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	11,678,000	233,560,000	2022	Seneng Makmur	Baik
7	Madiun	Dolopo	Glonggong		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	11,678,000	233,560,000	2022	Tani Muljo	Baik
8	Madiun	Kebonsari	Pucang Anom		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	11,678,000	233,560,000	2022	Anom Tani	Baik
9	Madiun	Kebonsari	Kradegan		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	11,678,000	233,560,000	2022	Bina Taruna	Baik
10	Blitar	Kesamben	Jugo		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	13,249,000	264,980,000	2022	Serbaguna	Baik
11	Blitar	Bakung	Plandirejo		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	13,249,000	264,980,000	2022	Utomo Karyo	Baik
12	Blitar	Garum	Bence		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	13,249,000	264,980,000	2022	Sopo Ngiro	Baik
13	Blitar	Nglegok	Kedawung		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	13,249,000	264,980,000	2022	Sumber Klampok	Baik
14	Blitar	Wates	Wates		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	13,249,000	264,980,000	2022	Sedia Makmur	Baik
15	Blitar	Gandusari	Ngaringan		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	13,249,000	264,980,000	2022	Eka Kapti II	Baik
16	Blitar	Ponggok	Kawedusan		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	13,249,000	264,980,000	2022	Ngudi Rahayu 1	Baik
17	Nganjuk	Kertosono	Tembarak		Sapi Indukan Lokal	PO/PO Silangan	20	ekor	13,249,000	264,980,000	2022	Lembah Brantas	Baik
18	Bangkalan	Kamal	Kebun		Sapi Indukan Lokal	Sapi Madura	20	ekor	11,075,000	221,500,000	2022	Karya Mulya	Baik
19	Bangkalan	Tragah	Soket Laok		Sapi Indukan Lokal	Sapi Madura	20	ekor	11,075,000	221,500,000	2022	Ingin Makmur-I	Baik

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2022

20	Bangkalan	Tanah Merah	Petrah		Sapi Indukan Lokal	Sapi Madura	20	ekor	11,075,000	221,500,000	2022	Wijaya Kusuma IV	Baik
21	Bangkalan	Tanah Merah	Pettong		Sapi Indukan Lokal	Sapi Madura	20	ekor	11,075,000	221,500,000	2022	Rukun Makmur	Baik
22	Sumenep	Kota Sumenep	Kolor		Sapi Indukan Lokal	Sapi Madura	20	ekor	11,075,000	221,500,000	2022	Sumber Bahagia	Baik
23	Sumenep	Rubaru	Rubaru		Sapi Indukan Lokal	Sapi Madura	20	ekor	11,075,000	221,500,000	2022	Baru Bangkit	Baik
24	Sumenep	Manding	Kasengan		Sapi Indukan Lokal	Sapi Madura	20	ekor	11,075,000	221,500,000	2022	Berkah Jaya	Baik
25	Sumenep	Pasean	Tlonto Raja		Sapi Indukan Lokal	Sapi Madura	20	ekor	11,075,000	221,500,000	2022	Idaman Tani	Baik
Jumlah										5.993.880,000			

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Penggunaan Dana Pen

Jenis Penggunaan	Nilai Pagu	Nilai Realisasi
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	5,993,880,000	5,993,880,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan Operasional Pengadaan, monev dan pelaporan	25,700,000	22,950,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Operasional Pengadaan, monev dan pelaporan	146,800,000	145,857,350
522151 Belanja Jasa Profesi Operasional Pengadaan, monev dan pelaporan	9,000,000	0,00
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Operasional Pengadaan, monev dan pelaporan	518,500,000	518,386,745
521211 Belanja Bahan Bimbingan Teknis Pengembangan Ternak	88,800,000	88,796,000
22151 Belanja Jasa Profesi Bimbingan Teknis Pengembangan Ternak	52,200,000	51,900,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Bimbingan Teknis Pengembangan Ternak	81,000,000	72,338,000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Bimbingan Teknis Pengembangan Ternak	378,000,000	375,000,000
---	-------------	-------------

Penggunaan anggaran PEN pada akun 526115 senilai 5,993,880,000 diantaranya untuk Pengadaan Sapi Potong Provinsi Jawa Timur paket 1 senilai 2,102,040,000. Pengadaan Sapi Potong Provinsi Jawa Timur Paket 2 senilai 2,119,840,000. Dan Pengadaan Sapi Potong Provinsi Jawa Timur Paket 3 senilai 1,772,000,000.

Penggunaan Dana PEN pada akun 521219 senilai 145,857,350 diantaranya untuk ATK dan Bahan Komputer senilai 11,401,300, Fotocopy dan Penjilidan Dokumen 4,884,000, Biaya Operasional pelaksanaan CPCL/Koordinasi/Supervisi/Seminar Kit/Pembinaan SDM/SPIP senilai 129,572,050.

Penggunaan Dana PEN pada Akun 521211 Belanja Bahan senilai 88,796,000 untuk Seminar Kit senilai 75,000,000, Fotocopy, ATK senilai 7,796,000, Spanduk Senilai 6,000,000.

F.2.2. Piutang PT. Ziya Sunanda

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp626.185.500,00 merupakan Uang Muka Belanja (prepayment) per 31 Desember sebesar Rp480.910.000,00 merupakan piutang pembayaran uang muka pembelian mesin Kejdal Mrck Buchi sebanyak 20% dari total nilai kontrak kepada PT. Ziya Sunanda Indonesia, dimana kontraknya telah diputus berdasarkan surat Pemutusan Kontrak Nomor: 14005/PL.030/F5.I/10/2021 pada tanggal 14 Oktober 2021. Besar kontrak tersebut Rp 2.904.550.000,00, sehingga besar pembayaran uang muka mesin tersebut adalah Rp 580.910.000,00. Tagihan piutang uang muka telah disampaikan kepada PT. Ziya Sunanda, namun sampai laporan ini dibuat belum terdapat penyelesaian pembayaran. Data tagihan tertuang dalam Kode Billing nomor: 820230126281501 tanggal 26 Januari 2023 dengan tanggal kadaluwarsa 02 Februari 2023. Dan Penyetoran jaminan Pelaksanaan TA.2022 dari PT. Ziya Sunanda Indonesia sebesar Rp145.227.500,00 tertuang dalam Kode Billing nomor: 820230126281679. Dan uang yang sudah dibayarkan sebesar 100.000.000,00 dalam kode billing 820221121112678.